

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, menjaga kestabilan harga, dan peningkatan kesempatan kerja. Indonesia merupakan salah satu negara yang kini masih di hadapi oleh berbagai permasalahan, baik dari segi perekonomian, kesempatan kerja, kemiskinan, dan pengangguran, maka dari itu pembangunan ekonomi di Indonesia harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia, telah dilakukan berbagai cara, diantaranya yaitu seperti menerapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya.

Indonesia juga termasuk salah satu negara yang saat ini sedang berkembang dan memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan tersebut sama seperti yang ada di dalam makro ekonomi yaitu untuk mencapai stabilitas perekonomian dalam kondisi kesempatan kerja penuh, mencapai inflasi yang rendah, tingkat pengangguran yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya mengalami perubahan, dengan perubahan tersebut juga akan berpengaruh terhadap salah satu permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satu permasalahannya yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi dan harus di atasi, karena akan menimbulkan dampak yang negative. Dampak negatif tersebut tidak hanya akan berpengaruh terhadap individu, melainkan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat dan

bahkan juga pemerintah.

Pengangguran dapat menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat dan bahkan menyebabkan sosial ekonomi yang tidak stabil, politik dan akan menambah angka kemiskinan. Setiap bangsa berupaya untuk menjadi bangsa maju dan sejahtera. Upaya ini harus didukung oleh pembangunan, dimana pada masa pasca perang dunia kedua pemikiran pada setiap negara selalu berupaya agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam setiap kebijakan pembangunannya guna mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara lain.

Pembangunan sendiri merupakan suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus dilakukan untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju yang pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat sendiri. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sendiri, pembangunan nasional menjadi salah satu indikator menuju perubahan ke arah yang lebih baik, pembangunan nasional harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap langkah yang diambil semakin mendekati tujuan. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan dari pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya

pengangguran.

Masalah kemiskinan dihadapi semua negara di dunia terutama di negara berkembang, seperti Indonesia. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar yang secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi di berbagai sektor sehingga pertumbuhan haruslah beriringan dan terencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian mereka yang tergolong miskin akan maju dan sejahtera.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari Nurkse. Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan SDM, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima yang akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga penciptaan lapangan pekerjaan rendah.

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT
Tahun 2011-2018 (persen)

Tahun	Tingkat Kemiskinan
2011	20.42
2012	20.41
2013	20.42
2014	20.61
2015	22.21
2016	22.19
2017	22.64
2018	21.35

Sumber BPS NTT 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas tingkat kemiskinan 8 tahun terakhir tidak stabil. Dimana pada tahun 2011 sebesar 20,42 persen menurun pada tahun 2012 sebesar 20,41 persen, pada tahun 2013 meningkat sebesar 20,42 persen, pada tahun 2014 meningkat menjadi 20,61 persen, pada tahun 2015 meningkat sebesar 22,21 persen, pada tahun 2016 menurun sebesar 22,19 persen, pada tahun 2017 meningkat sebesar 22,64 persen, dan pada tahun 2018 menurun sebesar 21,35 persen.

Tabel. 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTT
Tahun 2011-2018 (persen)

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)
2011	2.69
2012	2.62
2013	2.64
2014	2.66
2015	2.67
2016	2.72
2017	2.74
2018	2.86

Sumber BPS NTT 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan laju pertumbuhan penduduk provinsi NTT 8 tahun berakhir tidak stabil. Dimana pada tahun 2011 pertumbuhan

penduduk sebesar 2,69 persen menurun pada tahun 2012 sebesar 2,62 persen, pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 2,64 persen, pada tahun 2014 meningkat sebesar 2,66 persen, pada tahun 2015 meningkat sebesar 2,67 persen, pada tahun 2016 menurun sebesar 2,72 persen, pada tahun 2017 meningkat sebesar 2,74 persen dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 2,86 perse

Tabel 1.3
Tingkat Pengangguran NTT Tahun
2011-2018 (persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran
2011	3.48
2012	2.89
2013	3.35
2014	3.26
2015	2.96
2016	3.34
2017	3.46
2018	3.22

Sumber NTT Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel 1.3 diatas tingkat pengangguran 8 tahun terakhir tidak stabil. Dimana pada tahun 2011 sebesar 3,48 persen pada tahun 2012 menurun sebesar 2,89 persen ,pada tahun 2013 meningkat sebesar 3,35 persen, pada tahun 2014 menurun sebesar 3,26 persen, pada tahun 2015 menurun sebesar 2,96 persen, pada tahun 2016 menurun sebesar 3,34 persen, pada tahun 2017 meningkat sebesar 3,46 persen, pada tahun 2018 menurun sebesar 3,22 persen.

Perubahan yang terjadi pada tingkat pengangguran di Provinsi NTT ini disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, seperti sedikitnya peluang pekerjaan, tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang terlalu tinggi dan bahkan dengan adanya penetapan upah minimum juga akan menambah angka pengangguran yang ada, dikarenakan para pengusaha atau perusahaan akan merasa terbebaskan.

sehingga kemungkinan akan terjadinya kesulitan dalam pemberian upah terhadap karyawan atau dengan kata lain mengalami defisit, dampak tersebut juga akan dirasakan oleh si pekerja atau karyawan, salah satunya yaitu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lebih buruknya lagi dengan tutupnya sebuah perusahaan atau relokasi ke daerah lain.

Perdebatan tentang upah minimum sering terjadi, dikarenakan adanya perselisihan antara pengusaha atau pelaku industri dengan para pekerja, para pekerja menginginkan kenaikan upah minimum yang berpihak kepadanya, sedangkan para pengusaha merasa akan merugikan usahanya dengan adanya kenaikan upah minimum tersebut. Perdebatan yang muncul menyangkut sejauh mana upah riil mengikuti pertumbuhan produktivitas dan kebutuhan terhadap penentu upah minimum regional, maka dari itu kebijakan hukum pemerintah dibidang pengupahan sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan pekerja (Sumarsono 2013). Penerapan upah minimum, terutama untuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Hal tersebut terjadi dikarenakan pengangguran terbuka terjadi pada generasi muda yang baru saja menyelesaikan pendidikannya dan selanjutnya akan mencari kerja sesuai dengan keinginannya. Selain itu dengan adanya penerapan kebijakan upah minimum regional dan Undang-undang tentang ketenagakerjaan, bagi para pengusaha akan banyak menggunakan tenaga kerja kontrak, hal inilah yang akan menambah permasalahan pengangguran. Mengenai upah minimum regional, di Provinsi NTT masih merujuk pada ketentuan Upah Minimum Provinsi, yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi dan berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi NTT.

Tabel 1.4
Tingkat Upah Minimum Regional Provinsi NTT
Tahun 2011-2018

Tahun	UMP (%)
2011	5.93
2012	5.97
2013	6.00
2014	6.00
2015	6.10
2016	6.15
2017	6.18
2018	6.22

Sumber: BPS Provinsi NTT dalam angka

Berdasarkan tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat Upah Minimum setiap tahun mengalami kenaikan, terlihat dari tahun 2011 5.93%, tahun 2012 sebesar 5.97%, tahun 2013 sebesar 6.00%, tahun 2014 sebesar 6.00%, tahun 2015 sebesar 6.10%, tahun 2016 sebesar 6.15, tahun 2017 sebesar 6.18%, Peningkatan ini terus berkelanjutan sampai pada tahun 2018 sebesar 6.22%, sehingga UMR Provinsi NTT ini menunjukkan bahwa, pemerintah Provinsi NTT mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk mengurangi pengangguran yang memicu pada menurunnya angka kemiskinan di provinsi NTT.

Namun, dengan meningkatnya Upah Minimum pada setiap tahunnya, hanya sebagian saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka pengangguran. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Provinsi NTT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum Regional secara parsial terhadap Kemiskinan di Provinsi NTT?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum Regional secara simultan terhadap Kemiskinan di Provinsi NTT?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Regional secara parsial terhadap Kemiskinan di Provinsi NTT
2. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum Regional secara simultan di Provinsi NTT?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu yang telah di pelajari selama masa perkuliahan aktif dan juga menjadikan penelitian sebagai sarana dalam mempermudah diterima bekerja kelak.

2. Bagi Universitas

Membantu Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dalam membangun relasi dengan lembaga BPS, terutama BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Membantu Universitas Katolik Widya Mandira Kota Kupang dalam melakukan penelitian yang ada kaitanya dengan Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Provinsi NTT.